



Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Politik

(*Increasing Participation of First-Time Voters in Politics*)

Robyan Bafadal *

ITSKes Muhammadiyah Selong, Indonesia

Email: robby.bafadal@gmail.com *

Article History:

Received: April 13, 2025;

Revised: April 28, 2025;

Accepted: Mei 23, 2025;

Published: Mei 26, 2025;

Keywords: Political Participation,
Novice Voters, Voting

Abstract, *Political participation is a right and not an obligation for citizens. Political participation is the involvement of citizens in making general policies and determining government leaders. There are many types of political participation, from conventional to non-conventional. However, in developing countries including Indonesia, voting in general elections is the main political participation. After that, there is no more participation. In fact, participation should be carried out as long as politics and government exist. Especially for students who are classified as novice voters as agents of change and future political leaders.*

Abstrak

Partisipasi politik merupakan hak dan bukan kewajiban bagi warganegara. Partisipasi Politik merupakan keterlibatan warganegara dalam pembuatan kebijakan umum dan penentuan pemimpin pemerintahan. Partisipasi politik ada banyak macamnya mulai dari yang konvensional sampai dengan non-konvensional. Namun di Negara Berkembang termasuk Indonesia pemberian suara dalam pemilihan umum (voting) menjadi partisipasi politik yang utama. Setelah itu tidak ada lagi partisipasi dilakukan. Padahal harusnya partisipasi dilakukan sepanjang politik dan pemerintahan itu ada. Apalagi bagi mahasiswa yang tergolong pemilih pemula sebagai agen perubahan dan pemimpin politik masa depan.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Voting

1. PENDAHULUAN

Apa itu partisipasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi merupakan kata benda (*noun*) yang artinya perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Jadi partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu peristiwa atau kegiatan. Sementara politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; (3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan:.

Jadi apa itu partisipasi politik? Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin

pemerintahan. Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. (Damsar, 2010)

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul *Pembangunan Politik di Negara-negara Berkembang* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiarjo, 2008)

Partisipasi erat kaitannya dengan kesadaran politik warga dan seberapa besar kepercayaan pada pemerintah berkuasa. Jadi partisipasi berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi dan legitimasi pemerintah. Partisipasi (dalam pemilu) juga merupakan kontrol bagi masyarakat untuk pemerintah yang berkuasa. Dalam pelaksanaan partisipasi (dalam pemilu) ada mekanisme ganjaran dan hukuman bagi pemerintah. Dengan pelaksanaan partisipasi warga kemudian menuntut erat pemenuhan hak-hak politiknya. (Arniti, 2020)

Tidak semua warga aktif melakukan partisipasi. Masih banyak warga yang abai dan tidak menaruh perhatian pada politik dan masalah kebangsaan. (Andiraharja, 2020) Ini tentu menjadi masalah di kemudian hari ketika aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dan tidak dianggap penting. Sebabnya karena masyarakat abai pada permasalahan. Akibatnya pemerintah akan melayani kebutuhan dan aspirasi sekelompok saja bukan semuanya.

Partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua bagian besar; konvensional dan non-konvensional. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warganegara. (Gabriel A. Almond, 2006)

Tabel 1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi Politik	Berdemonstrasi
Kegiatan Kampanye	Konfrontasi

Membentuk dan bergabung dalam Kelompok Kepentingan Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	Mogok Tindak Kekerasan Politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) Perang gerilya dan revolusi
---	---

Sumber : Gabriel A. Almond. (2006). Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik

Pemberian suara (voting) kemudian kemudian menjadi salah satu bentuk partisipasi politik yang paling populer. Bahkan di negara totaliter sekalipun warga diminta ikut serta dalam pemilihan umum. Meskipun tujuannya berbeda dengan negara demokratis. Di negara totaliter pemilihan umum kemudian menjadi alat untuk legitimasi elit yang berkuasa. Penolakan untuk ikut memberikan suara dianggap sebagai pernyataan protes secara diam-diam. Berbeda dengan negara demokratis dimana pemilihan umum dimaksudkan memberi kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Pemilu yang kemudian diikuti oleh pemilih sebagai warga menjadi mekanisme sirkulasi elit dan terjadi ganjaran-hukuman. Bagi elit yang berkinerja baik akan mendapat ganjaran terpilih kembali dan bagi elit kinerja tidak baik mendapat hukuman tidak terpilih kembali. (Gabriel A. Almond, 2006)

Sayangnya partisipasi politik kemudian hanya dilakukan sekadar menjadi peserta Pemilihan Umum berupa pemberian suara (voting). Hal ini terjadi kalangan perempuan. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan sesungguhnya untuk kepentingan perempuan juga. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dimulai dari keterlibatan dalam politik dengan posisi sejajar bersama lelaki. Perempuan didorong terlibat melangkah jauh dalam politik sebagai wakil untuk mengambil putusan berkaitan dengan kaumnya. Akan tetapi, peran perempuan Indonesia dengan peran ganda dan sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik, Saat ini perempuan masih hanya dalam tahap partisipasi politik saja, seperti hanya sebagai peserta pemilihan umum. (Priandi & Roisah, 2019) Sesungguhnya bentuk partisipasi demikian tidak hanya pada perempuan tetapi juga lelaki. Partisipasi hanya dilakukan ketika Pemilihan Umum setelah itu apatis. Padahal sesungguhnya masih banyak bentuk partisipasi politik lain yang bisa dilakukan dan akan terus dilakukan selama politik dan pemerintahan itu ada. Termasuk pengalaman yang dirasakan oleh mahasiswa sebagai pemilih pemula.

Berdasarkan analisis situasi dan kondisi mahasiswa di Lombok Timur, maka dapat diketahui bahwa belum banyak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam hal melakukan partisipasi politik. Dari kondisi ini, maka ada beberapa hal yang berhasil kami identifikasi sebagai hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengetahui makna partisipasi politik
2. Masih minimnya kemampuan mahasiswa untuk menyiapkan bahan dan referensi melakukan partisipasi politik
3. Masih terbatasnya kemampuan mahasiswa untuk memahami partisipasi politik apa yang bisa dilakukan sebagai warga
4. Masih kurangnya pemahaman mahasiswa tentang politik dan pemerintahan secara umum

Dengan identifikasi masalah demikian, maka dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat dirumuskan permasalahan untuk ikut serta membantu memecahkan masalah yang terjadi, sebagai berikut:

1. Bagaimana memotivasi dan memberikan kesadaran kepada mahasiswa di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terhadap pentingnya melakukan partisipasi politik sebagai warganegara
2. Bagaimana cara melatih dan mendampingi mahasiswa agar dapat menjamin dirinya terlindungi ketika melakukan partisipasi politik.
3. Bagaimana cara memfasilitasi mahasiswa di Selong untuk memahami pelaksanaan politik dan pemerintahan secara umum

2. METODE PENGABDIAN

Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan, kami menyusun strategi dan langkah-langkah realistis melalui tahapan kegiatan berikut ini:

1. Pemetaan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa terkait partisipasi politik
2. Sosialisasi tentang pentingnya partisipasi politik warga
3. Workshop dan pelatihan tata cara pelaksanaan partisipasi politik

Deskripsi Mitra

Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa ITS Kes Muhammadiyah Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang sudah berhak untuk memilih. Dipilihnya mahasiswa sebagai khalayak sasaran karena mereka saat ini tergolong sebagai pemilih pemula yang pernah melakukan partisipasi politik minimal pemberian suara dalam pemilihan (voting). Selain itu,

mahasiswa adalah agen perubahan yang akan terjun langsung ke tengah masyarakat sehingga harus mampu menemukan masalah dan mencari solusinya.

Jaringan Kerjasama Kegiatan ini merupakan kerjasama beberapa pihak antara lain; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kelompok Dosen, dan Kelompok Mahasiswa ITS Kes Muhammadiyah Selong. Secara garis besar peran serta masing-masing pihak dapat dilihat pada Tabel 1.

Sebagai bagian dalam pemecahan masalah di atas maka tim pengabdian melaksanakan:

1. Sosialisasi kepada mahasiswa tentang materi partisipasi politik
2. Pemberian Materi bentuk partisipasi politik warga
3. Pemberian Materi tentang Kiat dan Strategi melakukan partisipasi politik
4. Pelatihan, Pendampingan, dan simulasi pengetahuan tentang politik dan pemerintahan secara umum

Tabel 2. Peran Masing-Masing Instansi dalam Kegiatan Pengabdian

No	Nama Instansi	Peranan
1	Kelompok Dosen Pelaksana Kegiatan	Merencanakan strategi pelatihan Menyediakan dan mengkoordinasikan nara sumber pada kegiatan sosialisasi Menjadi fasilitator sosialisasi Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan semua tahap kegiatan Menjadi nara sumber pelatihan
2	Kelompok mahasiswa Muhammadiyah Selong	Memberikan rekomendasi calon peserta Menjadi lembaga untuk jejaring kerjasama Memberikan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan Mengkoordinasi mahasiswa sebagai calon peserta Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pembahasan pada bagian sebelumnya maka kegiatan ini dilakukan berturut-turut dengan rincian sebagai berikut :

1. Sosialisasi Kepada Mahasiswa Tentang Partisipasi Politik

Dalam perkembangan politik di Indonesia memberikan banyak kesempatan untuk melakukan partisipasi politik. Tetapi yang paling umum dilakukan adalah Pemberian suara pada pemilihan umum (voting). Setelah itu warga menjauh dari politik pemerintahan. Memilih adalah partisipasi politik yang paling mudah dilakukan dan bisa tidak dilakukan. Dimungkinkan untuk tidak memilih karena itu adalah hak dan bukan kewajiban. Tidak ada sanksi atau hukuman bagi yang tidak memilih. Tetapi memilih merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik, dan bentuknya paling mudah dan murah. Memilih dianggap merupakan bentuk dukungan ataupun hukuman bagi politikus. Memilih bagi sebagian orang merupakan titik puncak dari keterlibatan warga negara dalam politik. Memilih merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam politik. Bukan berarti sebelumnya tidak pernah dilakukan bentuk lainnya tapi ini bentuk kelaziman. Namun memilih umumnya banyak dilakukan daripada bentuk yang lain. Oleh karena itu warga negara harus memilih.

Hal ini disampaikan oleh kelompok dosen yang merupakan pelaksana kegiatan ini dengan bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Materi yang disampaikan berdasarkan tiga sumber; peraturan perundangan negara, Peraturan Daerah dan logika akademik. Hal ini penting disampaikan agar mahasiswa mengerti kedudukannya sebagai warganegara. Nantinya mahasiswa akan mengerahkan segenap kemampuannya karena paham kedudukan dan pentingnya dalam upayanya menjadi seorang warganegara yang baik.

Dalam kehidupan sekitar ada banyak fenomena yang bisa dijadikan dasar yang mengganggu partisipasi politik. Maka tugas mahasiswa untuk melatih kepekaan untuk menemukan masalah itu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melatih kepekaan itu; membaca, berdiskusi, dan berpikir mendalam (filsafati). Dengan kepekaan itu maka kemudian akan mudah untuk mencari jawaban atas persoalan diatas. Sebagai intelektual kemudian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan dalam pemilu untuk mewujudkan keadaan politik yang lebih baik.

Partisipasi politik bukan berpikir angan-angan tapi diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka harus dipastikan memahami pengertian partisipasi politik. Untuk itu mahasiswa harus mulai untuk belajar mengetahui persoalan politik di sekitarnya. Meskipun memilih adalah bentuk partisipasi paling populer yang lebih bebas dalam tata caranya namun mahasiswa juga harus tahu bentuk partisipasi politik yang lain. Memilih adalah bentuk partisipasi politik paling murah dan mudah dalam pelaksanaannya. Mahasiswa haruslah belajar menentukan dengan bijak pilihan politiknya. Ini baiknya dipelajari dan dibiasakan sejak awal menjadi mahasiswa.

Bila pada kenyataannya mahasiswa menyadarinya ketika di bagian akhir kuliah memang terlambat tetapi tetap harus dilakukan. Mahasiswa adalah pemimpin politik di masa depan.

2. Pemberian Materi Bentuk Partisipasi Politik

Memilih adalah bagian dari partisipasi politik yang tata caranya ditentukan oleh peraturan perundangan. Dalam memilih ada banyak panduan atau pedoman yang beredar. Mari melihatnya secara positif bahwa semuanya benar. Namun tiap negara tiap institusi telah memiliki pedoman sendiri yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan pedoman lain. Untuk memilih di Indonesia ini haruslah mengikuti pedoman yang ada. Pedoman yang ada merupakan hasil pikiran dari para perumus peraturan perundangan.

Mahasiswa sebagai pemilih pemula harus memahami bahwa pemberian suara dalam pemilihan umum bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi politik. Ada banyak bentuk partisipasi politik yang bisa dilakukan warga mulai dari bentuk umum maupun jarang dilakukan. Sebagai pemimpin masa depan mahasiswa harus mampu melampaui awam dalam melakukan partisipasi politik. Ketika pemilu berakhir dan diumumkan pemenangnya bukan berarti partisipasi politik warga berakhir.

Materi ini diberikan oleh tim yang memang telah disiapkan sejak semula. Pemberian materi dimulai dari bentuk-bentuk partisipasi politik. Bisa dikatakan materi ini yang paling penting dalam kegiatan ini. Ini adalah materi inti agar mahasiswa mengerti bahwa ada banyak bentuk partisipasi politik. Ada beberapa bentuk yang bisa dilakukan dengan mudah oleh mahasiswa. Untuk itu mahasiswa kemudian dituntut untuk memahami pengertian dan bentuk partisipasi politik. Tentu ini tidak mudah karena merupakan hal yang baru bagi mahasiswa. Pada materi ini kemudian akan menimbulkan banyak pertanyaan di benak mahasiswa karena merupakan pekerjaan yang baru ditemui selama kuliah.

3. Pemberian Materi tentang Kiat Melakukan Partisipasi Politik

Partisipasi politik sesungguhnya adalah pekerjaan mudah dan tidak membutuhkan waktu banyak. Meskipun demikian akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Ada banyak gangguan yang ditemui saat melakukannya. Sebagaimana dikutip dari karya di atas gangguan itu setidaknya ada dua; faktor internal dan faktor eksternal. Maka penting bagi mahasiswa untuk mampu menyingkirkan gangguan itu selama melakukannya. Hal ini agar mahasiswa dapat memilih partisipasi politik apa yang bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. Penting bagi mahasiswa untuk memiliki minat yang tinggi atas keterlibatannya dalam politik.

Masalah bagi mahasiswa dalam partisipasi politik misalnya ketidakpahaman atas pentingnya dan sesuai dengan peraturan perundangan Hal pertama yang dilakukan adalah

memahami pengertian partisipasi politik dan peraturan perundangan yang mengaturnya. Langkah pertama yang dilakukan dengan memperbanyak membaca dan memahami kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Ada banyak permasalahan dalam masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan perlu disampaikan kepada pembuat kebijakan. Menjadi tugas mahasiswa menyuarakannya agar kebijakan pemerintah berpihak kepada orang banyak.

4. Pelatihan, Pendampingan, dan Simulas

Pelatihan tidak akan berarti apa-apa jika kemudian hanya dilakukan setengah atau satu hari misalnya. Sebagai pekerjaan yang baru ditemukan mahasiswa tentu membutuhkan pendampingan yang lebih dalam. Maka kemudian mahasiswa diberikan tugas untuk mengumpulkan isu-isu mengenai partisipasi politik dalam masyarakat. Tidak perlu isu politik yang besar tetapi terjadi di sekitarnya saja. Dari sana kemampuan mahasiswa akan diukur dan mengetahui kelemahan masing-masing.

Untuk itu mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang nantinya akan dibimbing oleh pendamping. Maka akan terjadi bimbingan secara berkelompok namun bisa juga dilakukan secara pribadi. Pada kegiatan pendampingan ini akan ditemukan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mendata masalah. Dan kemudian pendamping akan memberikan pendapat yang akan menunjukkan apa yang harusnya ditulis oleh mahasiswa sesuai peraturan perundangan.

Evaluasi

Untuk memastikan kegiatan dilaksanakan secara efektif maka diadakan sebuah evaluasi program. Dalam kegiatan ini dasar penilaian didasarkan atas dua hal yaitu kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan serta kemampuan dalam memahami konsep partisipasi politik secara teoritis dan pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi dilakukan bersama antara Tim PPM ITS Kes Muhammadiyah Selong dan semua pihak yang terkait. Hal ini bertujuan agar Tim PPM maupun peserta dapat memahami kegiatan telah terlaksana dengan baik

Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa ITS Kes Muhammadiyah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dipilihnya mahasiswa sebagai khalayak sasaran karena mereka saat ini tergolong pemilih pemula yang baru diakui oleh negara memberi suara pada saat pemilihan dan menjadi salah satu agen perubahan dalam masyarakat.

Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam program pengabdian ini ada tenaga yang memiliki kepakaran dalam bidang keilmuannya masing-masing. Kepakaran yang dimiliki oleh setiap personil pengabdian sangat relevan dengan fokus pengabdian yang akan dilaksanakan.

Selain itu, pengabdian ini akan melibatkan oleh mahasiswa yang akan membantu pada aspek-aspek teknisnya. Adapun jenis kepakaran tim pengabdian akan diuraikan pada tabel 3.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dideskripsikan pada tiga kriteria yang merupakan indikator ketercapaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat di ITS Kes Muhamadiyah Selong. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 yang bertempat Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang berdasarkan analisis situasi mengenai kondisi mahasiswa di Lombok Timur, maka dapat diketahui bahwa belum banyak yang memiliki kemampuan dan kemampuan memahami politik dan pemerintahan dengan baik. Dari kondisi ini, maka ada beberapa hal yang berhasil kami identifikasi sebagai hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep partisipasi politik
2. Masih minimnya kemampuan mahasiswa untuk merefleksikan kondisi dan realitas sosial yang mereka hadapi ke dalam bentuk pilihan
3. Masih terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam memahami bagaimana partisipasi politik dan pelaksanaannya di lapangan
4. Masih kurangnya pemahaman mahasiswa tentang politik dan pemerintahan secara umum

Tabel 3. Tugas dan Kewajiban Tim Pengabdian

No	Nama	Status	Tugas dan Kewajiban
1.	Robyan Bafadal	Dosen	Menyiapkan dan koordinasi kelangsungan seluruh acara
2.	Honoris Causa	Anggota	Mensosialisasikan pada calon peserta
3.	Dita Febriana	Anggota	Menyiapkan materi untuk pembekalan partisipasi politik kepada peserta kegiatan

Berangkat dari identifikasi kebutuhan dari mahasiswa tersebut, maka tahapan pertama dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi terkait pentingnya partisipasi politik dalam pembangunan bangsa. Penyampaian sosialisasi dilaksanakan secara jelas, runtut dan sistematis sehingga membuat peserta antusias mengikuti

jalannya acara tersebut. Peserta kegiatan mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama paparan substansi dari pembicara.

Skenario sosialisasi dimulai dengan pendahuluan dalam kegiatan tersebut pembicara menyampaikan ruang lingkup dan tujuan dari materi tentang pentingnya partisipasi politik sebagai seorang warganegara. Tahapan selanjutnya adalah penyampaian kegiatan inti yang meliputi membangun pengetahuan tentang pelaksanaan partisipasi politik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pembicara menyampaikan bahwa dalam memilih ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar surat suara sah. Hal tersebut meliputi:

1. Partisipasi politik adalah dan bukan kewajiban tetapi warganegara akan rugi bila tidak menggunakan haknya.
2. Pelaksanaan partisipasi politik hak tata caranya sudah ditentukan oleh peraturan perundangan
3. Hal paling penting sebagai warganegara adalah melaksanakan partisipasi politik

Selain menyampaikan materi tentang kiat melaksanakan partisipasi politik juga membahas tentang materi peranan mahasiswa sebagai pemilih pemula yang partisipasinya menentukan masa depan bangsa ke depan. Pemerintah secara umum kemudian berharap besar pada kesertaan pemilih muda termasuk pemilih pemula dalam politik dengan melaksanakan partisipasi politik warga. Sebagaimana diketahui lebih dari setengah pemilih pada Pemilu 2024 kemudian dikategorikan sebagai pemilih muda.

Selanjutnya langkah ke dua yang dilakukan tim pengabdian masyarakat adalah Pemetaan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami berbagai masalah dalam partisipasi politik. Dalam tahapan ini tim melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang hadapi oleh mitra terkait partisipasi politik. Dalam tahapan ini masing-masing mahasiswa menyampaikan permasalahan dan kendala mereka dalam memahami tata cara partisipasi politik.

Setelah masalah tersebut teridentifikasi tim memberikan pendampingan kepada mahasiswa dalam melakukan partisipasi politik. Ini adalah tahapan ketiga yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan pendampingan ini mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi yang salah tentang partisipasi politik sebagaimana sering mereka temukan di berbagai saluran komunikasi massa.

Antusiasme peserta terlihat dari ketekunan mereka mengikuti materi dari awal hingga akhir dari pelaksanaan pengabdian ini. Pentingnya menggali informasi sebanyak-banyaknya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah karena mahasiswa mau tidak mau harus memenuhi kewajibannya sebagai warganegara yang baik dalam hal kesertaan dalam politik dan pemerintahan.

4. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan melaksanakan partisipasi politik bagi mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri sebagai bagian tugas mereka sebagai agen perubahan. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut mengikuti jalannya acara dengan sangat antusias. Antusiasme peserta terlihat dari ketekunan mereka mengikuti materi dari awal hingga akhir dari pelaksanaan pengabdian. Hasil dari antusiasme dan ketekunan dalam mengikuti jalannya acara tersebut menghasilkan sebuah pemahaman terkait tata cara pelaksanaan partisipasi politik sebagai warganegara. Informasi mengenai pentingnya pemahaman tentang peningkatan keterampilan melakukan partisipasi politik sangat diperlukan bagi mahasiswa yang merupakan pemilih pemula. Oleh karena itu pemerintah perlu secara berkala memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan perkembangan politik dan apa yang harus dibangun untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik* (1st ed.). Prenada Media Kencana.
- Gabriel A. Almond. (2006). Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik. In M. M. dan C. MacAndrews (Ed.), *Perbandingan Sistem Politik* (Ketujuhbel, pp. 33–51).
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>